

Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 7 Tahun 2010 Terhadap Pencatatan Aset Tetap Di Pemerintah Kota Serang Provinsi Banten

Deny Aditya^{1)*}, Dini Khoirunnisa²⁾, Lia Uzliawati³⁾

¹⁾²⁾ Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Kota Serang, Provinsi Banten

³⁾ Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Kota Serang, Provinsi Banten

¹⁾ denyaditya0112@gmail.com

Abstrak

Aset Tetap merujuk pada benda berwujud yang memberikan manfaat selama lebih dari dua belas bulan atau setidaknya satu tahun fiskal dan digunakan untuk kegiatan operasional suatu entitas. Penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk menganalisis kesamaan dalam pencatatan Aset Tetap pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Serang, Provinsi Banten, dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku dan telah ditetapkan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan analisis perbandingan. Perbandingan dilakukan dengan membandingkan data dari objek penelitian pada tahun sebelumnya. Selain itu, penelitian juga membandingkan penerapan akuntansi terhadap Aset Tetap di BPKAD Kota Serang berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 7 Tahun 2010. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan pencatatan akuntansi terhadap Aset Tetap sesuai dengan Peraturan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 7 Tahun 2010. Dalam hal pengakuan, perhitungan, penyelesaian, eliminasi, dan penurunan nilai ekonomi, semuanya telah dilakukan dengan konsisten dan sesuai dengan kebijakan SAP No. 7 Tahun 2010.

Kata kunci: Aset Tetap, SAP 7 Tahun 2010

Abstract

Fixed assets refer to tangible assets that provide benefits for more than twelve months or at least one fiscal year and are utilized in operational activities within an entity. The objective of this study is to examine the similarities in the recording fixed assets at the Regional Agency for Financial Management and Savings (BPKAD) of Serang City, Banten Province, in alignment with the established Government Accounting Standards. The research employs a qualitative method, specifically utilizing a comparative analysis approach. The comparison involves assessing data from the previous year's research objects and examining the application of accounting to fixed assets in BPKAD Serang City based on Government Accounting Standards No. 7 of 2010. The findings indicate that the accounting treatment for fixed assets aligns with Government Accounting Standards Regulation No. 7 of 2010. Recognition, calculation, settlement, elimination, and the reduction in economic value are consistent with the SAP Policy No. 7 of 2010.

Keywords: Fixed Assets, SAP 07 of 2010

1. PENDAHULUAN

Kebijakan yang telah diterapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia memiliki dampak strategis baik dari aspek hukum maupun perekonomian. Salah satu kebijakan tersebut mengatakan bahwa Otonomi daerah adalah hak, kekuasaan, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri, termasuk urusan pemerintah lainnya dan menangani kepentingan masyarakat, sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014, Pasal 1 (5), yang diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 22 Tahun 2004. Sejak diberlakukannya peraturan mengenai

otonomi daerah, seluruh provinsi, kabupaten, atau kota di Indonesia diwajibkan untuk bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan akuntabilitas Pengelolaan keuangan daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

“Aset merupakan potensi keuntungan ekonomi di masa mendatang yang didapatkan dan dikendalikan oleh suatu entitas sebagai akibat dari transaksi atau peristiwa masa lampau. Terdapat tiga karakteristik penting dari Aset, diantaranya (1) manfaat di masa depan, (2) memperoleh keuntungan dan mengendalikan akses keuntungan, (3) transaksi atau peristiwa lain yang memberikan hak tertentu” (Schroeder dkk, 2020). Pengertian lain dari aset tetap adalah “sesuatu hal yang bersifat permanen atau masa manfaatnya lebih dari satu tahun yang digunakan dalam sebuah operasional suatu entitas” (Ismail dkk, 2022).

Laporan Aset Tetap yang terdapat di dalam surat berharga memiliki nilai periode, dan periode digunakan untuk menyusun laporan surat berharga. Dalam menggunakan aset tetap, perusahaan harus menggunakannya secara tepat dalam operasional yang penting bagi jumlah aset dalam perusahaan (Herison et al., 2022). Terdapat batasan tertentu dalam penggunaan aset tetap untuk keperluan perusahaan atau pemerintah. Pengurangan dan penambahan nilai aset tetap dapat terjadi akibat proses transaksi jual beli atau ditukar untuk kepentingan suatu entitas.

“Pentingnya perlakuan akuntansi terhadap aset tetap mempengaruhi sebuah laporan keuangan suatu entitas. Oleh karena itu, kesalahan perhitungan dan pencatatan serta kebijakan terhadap aset tetap dapat berdampak signifikan terhadap kualitas dari laporan keuangan tersebut dan menyebabkan laporan yang tidak adil” (Ardana, Lukman, 2016). “Dalam laporan keuangan, penyajian aset tetap yang wajar dan akurat sangat membantu manajemen perusahaan dalam memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya kepada pemangku kepentingan” (Idris, 2019). “Laporan aset tetap bisa digunakan untuk mengetahui aktivitas yang diharapkan suatu bisnis dan membuat keputusan tentang bagaimana meningkatkan kinerja bisnis dengan menggunakan aset tetap dengan lebih efisien” (Syamsuddin dkk, 2022).

Ada berbagai metode penyusutan aset tetap, seperti penyusutan garis lurus dan penyusutan saldomenurun. Penyusutan yang metode saldo menurun terbagi lagi menjadi metode jumlah digit dan metode saldo menurun berganda. Maka dari itu, suatu entitas perlu menerapkan suatu sistem akuntansi terhadap aset tetap untuk memperkirakan umur ekonomis secara lebih akurat. Hal tersebut sangatlah penting karena jika suatu entitas dapat memperkirakan umur ekonomis aset tetap berdampak untuk menginterpretasikan masa manfaat aset tetap tersebut lebih efektif lagi dip periode akuntansi selanjutnya.

BPKAD atau singkatan dari “Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah” wilayah Kota Serang Provinsi Banten adalah lembaga pemerintahan yang menyelenggarakan fungsi pada bagian keuangan dan pengelolaan aset daerah dari proses transaksi seperti pendapatan, belanja, pembiayaan. Properti permanen (aset tetap) yang dicatat dalam laporan keuangan Pemerintah Kota Serang terdiri dari aspek-aspek yang termasuk dalam kategori aset tetap mencakup tanah, gedung dan bangunan, serta peralatan dan mesin. Oleh karena itu, untuk mengevaluasi sejauh mana metode pencatatan akuntansi yang diterapkan pada aset permanen yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Serang sesuai dengan ketentuan Peraturan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 7 Tahun 2010 maka perlu dilakukan sebuah investigasi dan penelitian.

2. TINJAUAN PUSTAKA

“Pencatatan, pengikhtisaran, pengklasifikasian, pengolahan, dan penyajian data transaksi dan berbagai aktivitas keuangan adalah semua bagian dari akuntansi. Akuntansi adalah suatu sistem informasi yang melaporkan aktivitas ekonomi dan status perusahaan kepada pemangku kepentingan” (Warren, James, dkk, 2018). Akuntansi terdiri dari tiga tugas utama: “mengidentifikasi, mencatat, dan memberi tahu pemangku kepentingan tentang aktivitas keuangan organisasi” (Keiso, Donald, dkk, 2018:4).

“Aset berwujud yang digunakan untuk menyediakan barang atau jasa, disewakan kepada orang lain, atau digunakan untuk tujuan administratif dan diharapkan dapat digunakan dalam jangka waktu tertentu disebut aset tetap” (IAI, 2017:06). “PSAP Nomor 07 adalah Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) yang mengatur akuntansi modal. PSAP Nomor 7 menyatakan bahwa “Standar Akuntansi Pemerintahan” adalah prinsip akuntansi yang berlaku saat

membuat dan menyerahkan laporan keuangan pemerintah” Rusmanah, Setyaningrum dkk, (2017:32).

“Menurut Laporan Standar Akuntansi Publik (SAP) aset berwujud dengan masa manfaat lebih dari dua belas bulan untuk kegiatan pemerintah atau masyarakat umum. Pencatatan akuntansi untuk aset tetap dicatat terpisah. Sedangkan aset tetap yang harga satuannya rendah digolongkan sebagai persediaan atau barang pakai habis” (Erlina, dkk (2017 :245). Contoh aset tetap yang dimiliki pemerintah namun digunakan oleh entitas lain seperti universitas, kontraktor dan instansi pemerintah lainnya. Aset tetap tanah yang digunakan untuk konsumsi nilai asetnya tidak termasuk dalam pengertian harta tetap (aset tetap). Didalam sebuah aktivitas operasional suatu entitas yang dikelola negara, persyaratan seperti bahan dan perlengkapan harus sudah ditentukan setiap periodenya.

Menurut ketentuan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), “pengertian aset adalah suatu sumber daya, khususnya sumber daya non-keuangan, yang dapat memberikan manfaat ekonomi atau sosial, dikuasai atau dikuasai oleh pemerintah, dan dapat diukur dalam satuan moneter. Ini adalah sumber daya yang diperlukan untuk memberikan layanan kepada sejumlah orang yang tidak ditentukan dan dipelihara karena berbagai alasan seperti sejarah dan budaya.”

Aset tetap memiliki peran yang krusial dalam menjalankan operasional bisnis secara efektif. Untuk memanfaatkan peran ini secara maksimal, Dibutuhkan kebijakan yang sesuai untuk mengelola aset tetap dengan baik. Dalam situasi ini, alat informasi mengenai aset tetap sangat penting untuk pengambilan Keputusan contohnya Akuntansi Pencatatan Aset. Sistem SAP yang berbasis akrual yang terdokumentasi dalam Lampiran I, sedangkan yang lainnya menggunakan akrual tunai. Sedangkan pada Lampiran II berisi lampiran yang memuat seluruh SAP yang tercantum pada PP 24 berisi aturan. Tidak ada perubahan yang dilakukan pada tahun 2005. Standar akuntansi akrual pemerintah diterapkan dengan diundangkannya Peraturan Pemerintahan No. 71 pada Tahun 2010.

Sesuai dengan (PSAP) No. 7, Paragraf 80 sampai 81, “Untuk setiap jenis aset tetap, laporan keuangan harus memuat: penilaian yang digunakan untuk mengetahui jumlah yang tercatat Dasar penyesuaian nilai buku harus diungkapkan. Awal dan akhir periode merupakan penambahan Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada. atau perubahan lain pada aset, informasi penyusutan (termasuk jumlah penyusutan). “

Metode pengurangan nilai dan tarif penyusutan yang diterapkan, serta nilai buku dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode. Keberadaan dan keterbatasan kepemilikan aset tetap. Prinsip akuntansi untuk mengkapitalisasi aset tetap. Jumlah yang dikeluarkan untuk barang modal selama konstruksi. Jumlah komitmen untuk memperoleh aset tetap. Sehubungan dengan pekerjaan konstruksi yang sedang berlangsung, PSAP No. 8, paragraf 34 mengatur bahwa, pada akhir suatu periode akuntansi, entitas menyediakan informasi mengenai pekerjaan konstruksi yang sedang berlangsung dengan melampirkan rincian kontrak konstruksi yang sedang berlangsung, seperti tingkat penyelesaian dan penyelesaian. Periode ini menetapkan bahwa informasi harus diungkapkan

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertempat dan dilaksanakan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Serang. Waktu dan tanggal Pada saat Penelitian ini berlangsung selama satu bulan, dimulai dari 01 November 2023 sampai dengan 01 Desember 2023. tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data yang valid, “teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian. Karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data yang valid, teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis. Oleh karena itu, salah satu syarat keberhasilan penelitian adalah peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang tepat. Penentuan dan pemilihan teknik pengumpulan data yang tepat diharapkan akan memudahkan peneliti mendapatkan data yang akurat dan informasi yang diperlukan.” (Jumarding, dkk, 2021).

Peneliti dalam studi ini menerapkan beberapa metode pengumpulan data sebagai berikut, dengan detail sebagai berikut:

1. Penelitian lapangan adalah jenis penelitian yang dilakukan dengan mengunjungi subjek penelitian secara langsung.

2. Dokumen merupakan cara untuk mengumpulkan data melalui pencatatan langsung, terutama terkait nilai perolehan aset tetap, pelepasan aset tetap, penyusutan, serta presentasi dan pengungkapan aset tetap dalam laporan keuangan. Ini juga mencakup penyalinan informasi yang dianggap penting untuk mendukung dan memeriksa penelitian.
3. Interview/wawancara merupakan metode pengumpulan data yang melibatkan dialog langsung dengan bertanya dan menjawab pertanyaan. kepada manajer dan karyawan perusahaan untuk mendapatkan informasi tentang aset tetap dan alasan perusahaan melakukannya.
4. Dengan melihat objek, pokok bahasan, dan aktivitas di setiap bagian entitas secara langsung, observasi adalah metode yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang akurat tentang subjek penelitian. Metode ini digunakan untuk melengkapi data yang dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yang melibatkan peneliti dalam kondisi obyek alam. Kedua data primer dan sekunder digunakan untuk melakukan penelitian ini. Dalam penelitian ini, analisis komparatif digunakan. “Analisis melibatkan mempelajari secara menyeluruh komponen, hubungannya, dan aspek terkait untuk mendapatkan pemahaman dan pemahaman yang lebih baik tentang topik. Analisis penelitian dengan metode komparatif melibatkan membandingkan data yang diteliti dengan data pembanding.” (Karim et al., 2022). Ini dilakukan dengan memeriksa dan membandingkan metode akuntansi untuk aset tetap yang dilakukan oleh Badan Pengelola Aset Keuangan Daerah (BPKAD) Kota Serang dengan perlakuan akuntansi yang dilakukan berdasarkan SAP No. 07 Tahun 2010.

Variabel penelitian diantaranya analisis (ilmu yang mempelajari peristiwa), Akuntansi Aset Tetap, pengakuan dan penilaian terhadap aset tetap itu sendiri, pelepasan aset tetap, laporan aset tetap (neraca) dan disajikan sebesar biaya perolehan dikurangi nilai Akumulasi Penyusutannya, pengungkapan kriteria penilaian aset tetap untuk menentukan nilai dari biaya perolehan, biaya penyusutan dan metode penyusutan yang digunakan dalam pencatatan aset tetap

4. PEMBAHASAN

Aset tetap pada neraca Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2022 termasuk barang intrakomptabel, Ini adalah aset tetap yang memenuhi kriteria dan batasan kapitalisasi dan diperoleh sebelum penerapan kebijakan kapitalisasi. Selain itu, aset juga dapat diperoleh dari transaksi pengalihan, penukaran atau penerimaan hasil pengalihan, dan aset juga dapat dialihkan dari buku barang non kontrak apabila jumlah kumulatif biaya perolehan dan nilai pengembangan mencapai batas modal minimum kapitalisasi.

Perbandingan Aset Tetap yang terdapat di Peraturan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 7 Tahun 2010 dengan Asep Tetap yang terdapat di BPKAD Kota Serang.

Tabel 1. Perbandingan Pencatatan

Aset Tetap Menurut PSAP No. 7 Tahun 2010	Aset Tetap yang tercatat di BPKAD Kota Serang	Keterangan
Tanah	Tanah	Sudah Sesuai
Peralatan dan Mesin	Peralatan dan Mesin	Sudah Sesuai
Jalaan, Irigasi dan Jaringan	Jalaan, Irigasi dan Jaringan	Sudah Sesuai
Aset Tetap lainnya	Aset Tetap lainnya	Sudah Sesuai
Konstruksi Dalam Pengerjaan	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Sudah Sesuai

*Data yang digunakan bersumber dari hasil pengolahan tahun 2023.

Pada tabel diatas dijelaskan bahwa pembagian yang dilakuan BPKAD Kota Serang terhadap aset tetap sangat konsisten atau tidak berbeda dengan peraturan yang terdapat di SAP, peneliti menyimpulkan bahwa tingkat kepatuhan 100% dan menunjukkan bahwa klasifikasi ini tidak menimbulkan masalah.

Data perolehan hasil observasi yang peneliti dapatkan yaitu Data Aset Tetap yang dimiliki Pemerintah Kota Serang Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran sebelumnya yaitu 2021 sebagai berikut :

Tabel 2. Neraca Tahun Anggaran 2021

No.	Uraian	2021 (Audited) Rp.
1.	Tanah	1.461.330.849.544,97
2.	Peralatan dan Mesin	508.508.558.967,69
3.	Gedung dan Bangunan	854.290.615.177,95
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.226.586.439.247,22
5.	Aset Tetap Lainnya	29.626.849.584,03
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	95.360.480.725,00
7.	Akumulasi Penyusutan	(1.112.398.360.764,02)
Jumlah		3.285.701.845.061,32

*Data yang digunakan bersumber dari hasil pengolahan tahun 2023.

Tabel 3. Neraca Tahun Anggaran 2022 (sebagai pembandingan)

No.	Uraian	2022 (Audited) Rp.
1.	Tanah	1.634.140.196.909,13
2.	Peralatan dan Mesin	549.868.542.939,06
3.	Gedung dan Bangunan	983.538.161.616,08
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.342.705.637.423,07
5.	Aset Tetap Lainnya	39.271.376.011,03
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	40.741.697.085,00
7.	Akumulasi Penyusutan	(1.274.049.093.717,03)
Jumlah		3.285.701.845.061,32

*Data yang digunakan bersumber dari hasil pengolahan tahun 2023.

Dari data diatas telah didapat sebuah informasi bahwa nilai Aset Tetap yang dimiliki Pemerintah Kota Serang pada Tahun Anggaran 2022 (Audited) sebesar 3.316.216.518.266,34 (setelah penyusutan) yang artinya meningkat sekitar 8,26% dari tahun 2021 yang sebelumnya hanya 3.063.305.432,84. Adapun data lengkap mengenai Aset Tetap Pemerintah Kota Serang yang dicatat oleh BPKAD sebagai berikut :

1. Tanah

Pencatatan akuisisi tanah dilakukan sebagai bagian dari biaya perolehan di neraca; jika harga perolehan tidak jelas atau sulit diperoleh, nilai perkiraan digunakan. Nilai sejarah tanah dinilai oleh BPKAD Kota Serang, . Nilai wajar, atau perkiraan, digunakan untuk menilai tanah tanpa nilai sejarah. Pada tahun 2021, neraca negara sebesar 1.461.330.849.544,97, dan pada tahun 2022, penggunaan lahan sebesar 172.809.347.364,16, atau saldo tanah sebesar 1.634.140.196.909,13.

2. Peralatan dan Mesin

Pada neraca BPKAD Kota Serang, Pencatatan peralatan dan mesin dilakukan sebagai nilai perolehan dengan masa manfaat minimal dua belas bulan. Di sisi lain, mereka dicatat sebagai biaya perolehan dan memiliki masa manfaat lebih dari dua belas bulan. Diproyeksikan belanja modal untuk peralatan dan mesin pada tahun 2021 sebesar 508.508.558.967,69 Diantisipasi bahwa pembelanjaan modal untuk peralatan dan juga mesin pada tahun 2022 mencapai 41.359.983.971,37, dengan saldo total peralatan dan mesin pada tahun 2022 sebesar 549.868.542.939,06.

3. Gedung dan Bangunan

Dalam neraca BPKAD Kota Serang, bangunan dan peralatan konstruksi ditampilkan dengan Nilai perolehan dan masa manfaat selama 12 bulan atau lebih. Jumlah nilai aset gedung dan bangunan pada tahun 2021 adalah sebesar 854.290.615.177,95, tetapi pada tahun 2022, pengadaan aset gedung dan bangunan menjadi 129.247.546.438,13, dan saldo gedung dan bangunan pada tahun 2022 adalah 983.538.161.616,08.

4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Dalam neraca BPKAD Kota Serang, Jalan, irigasi, dan jaringan dicatat sebagai nilai perolehan dengan masa manfaat minimal dua belas bulan. Tahun 2021, saldo untuk Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar 1.226.586.439.247,22, dan pada tahun 2022 Pengeluaran modal yang terealisasi/tersalurkan untuk beberapa pengadaan aset jalan, irigasi, dan jaringan adalah 116.119.198.175,85, sehingga harga perolehan untuk Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah 1.342.705.637.423,07.

5. Aset Tetap Lainnya

Dalam neraca, Aset tambahan tersebut direkam dengan nilai perolehan dan memiliki masa manfaat minimal dua belas bulan. Namun, dalam BPKAD Kota Serang Aset tambahan tersebut direkam dengan nilai perolehan dan memiliki masa manfaat minimal dua belas bulan, atau 4 tahun. Pada tahun 2021, saldo aset tambahan tersebut sebesar 29.626.849.584,03, tetapi pada tahun 2022, terdapat realisasi belanja modal sebesar 9.644.526.427,00, sehingga saldo aset tetap lainnya tahun 2022 sebesar 39.271.376.011,03.

6. Konstruksi Dalam Pekerjaan

Dalam neraca, aset konstruksi yang dalam proses pengerjaan diakui pada catatan akuntansi. berdasarkan harga perolehan dan memiliki harga perolehan dan masa manfaat minimal dua belas bulan.. Sebaliknya, dalam BPKAD Kota Serang , aset konstruksi dalam pengerjaan dicatat berdasarkan harga perolehan. Jumlah konstruksi yang sedang dilakukan pada tahun 2021 adalah Rp. 95.360.480.725,00, tetapi pada tahun 2022 terjadi penurunan belanja modal sebesar Rp. 54.618.783.640,00, sehingga jumlah konstruksi yang sedang dilakukan pada tahun 2022 di BPKAD Kota Serang adalah Rp. 40.741.697.085,00.

7. Pengukuran Aset Tetap

Hasil perbandingan penilaian aset tetap di BPKAD sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010 No. 7, dinilai dari berdasarkan harga yang didapatkan. Apabila aset tetap dinilai berdasarkan biaya historis, jika hal ini tidak memungkinkan, maka dalam hal ini nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar aslinya. Dalam menilai aset tetap perlu memperhatikan pedoman yang menetapkan Unit kecil kapitalisasi untuk aset tetap. Apabila nilai perolehan suatu aset tetap kurang dari batas minimum kapitalisasi, aset tersebut tidak dapat diakui sebagai aset tetap. Sebagai gantinya, aset tersebut diperlakukan sebagai aset lainnya. Bangunan yang telah selesai atau selesai dibangun dalam proyek konstruksi harus segera dipindahkan ke rekening yang sesuai dengan kategori aset tetap.

8. Pengukuran Setelah Pengakuan Awal

Hasil perbandingan antara penilaian awal di lembaga BPKAD Kota Serang sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010 (SAP) menunjukkan bahwa jumlah yang diperoleh dihitung dengan mengurangi total penyusutan aset tetap bersama dengan harga perolehan aset tetap. "Metode penyusutan harus mempertimbangkan manfaat ekonomi atau jasa potensial yang akan diberikan pemerintah". (Trisnawati, 2015). Aset tetap, yang adalah bagian dari aset operasional negara, dapat mengurangi kapasitas produksi tergantung pada bagaimana digunakan. Akibat penurunan kapasitas dan kegunaan aset, masa manfaat masing-masing kelompok aset tetap diperhitungkan pada saat penyesuaian nilai. Nilai aset tetap yang dapat mengalami penyusutan selama periode manfaatnya dialokasikan secara sistematis, yang dikenal sebagai penyusutan.

Hasil perbandingan dekomisioning dan pembuangan di BPKAD Telah sesuai dengan pernyataan Peraturan Pemerintah No. 71 pada Tahun 2010 (SAP) No. 07. Oleh karena itu, aset tetap yang ditanggguhkan atau dilepaskan secara permanen harus dikeluarkan dari neraca dan dilaporkan di Laporan Keuangan (CaLK). Peraturan perundang-undangan mengatur pemutusan dan penjualan aset tetap. Aset pemerintah daerah yang tidak lagi digunakan akan direklasifikasi ke dalam kategori aset lainnya. Ketika aset tersebut dipindahkan atau dihentikan secara permanen, aset tetap dikeluarkan dari neraca setelah mendapat persetujuan penyusutan sesuai ketentuan yang berlaku.

Menurut Wisnantiasri (2018), beberapa situasi dan alasan penghentian aset tetap termasuk pemindahtanganan atau penukaran dengan aset tetap lainnya. Ini digunakan sebagai investasi; ketika aset lokal tidak dapat digunakan lagi, dijual; dan ketika persyaratan pelepasan juga terpenuhi, dibuang.

Dalam laporan keuangan BPKAD Kota Serang, penyajian aset tetap disajikan secara terpisah. Tanah, struktur, jalan, irigasi, dan jaringan, peralatan dan mesin, aset lainnya, dan pekerjaan konstruksi yang sedang berlangsung. Selain itu, Aset tetap dipresentasikan dalam neraca dengan nilai biaya perolehan dikurangi total penyusutan akumulasi.

Dan untuk daftar aset tetap, dapat dilihat saldo akumulasi penyusutan pada akhir tahun atau periode. Pada setiap akhir periode, nilai buku aset tetap kemudian diubah untuk menunjukkan penambahan dan perubahan aset tetap.

Dalam neracanya, BPKAD Kota Serang menampilkan aset tetap secara tepat, tetapi akumulasi penyusutan tidak ditampilkan secara terpisah. Akumulasi penyusutan masing-masing kelompok aset tetap tidak dapat segera diketahui karena akumulasi penyusutan semua aset tetap digabungkan menjadi satu nilai. Semua aset yang dimiliki BPKAD Kota Serang nilainya tersebut tercatat dalam neraca dengan biaya perolehan dikurangi total akumulasi penyusutan. Pada akhir setiap periode, nilai buku aset tetap diubah untuk menunjukkan berapa banyak aset tetap yang ditambahkan atau diubah.

Tabel 4. Hasil Analisis Perbandingan

No.	Uraian	2021 (Audited) Rp.	2022 (Audited) Rp.	Bertambah/ Berkurang	Prosentase (%)
1.	Tanah	1.461.330.849.544,97	1.634.140.196.909,13	172.809.347.364,16	11,83
2.	Peralatan dan Mesin	508.508.558.967,69	549.868.542.939,06	41.359.983.971,37	8,13
3.	Gedung dan Bangunan	854.290.615.177,95	983.538.161.616,08	129.247.546.438,13	15,13
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.226.586.439.247,22	1.342.705.637.423,07	116.119.198.175,85	9,47
5.	Aset Tetap Lainnya	29.626.849.584,03	39.271.376.011,03	9.644.526.427,00	32,55
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	95.360.480.725,00	40.741.697.085,00	(54.618.783.640,00)	(57,28)
7.	Akumulasi Penyusutan	(1.112.398.360.764,02)	(1.274.049.093.717,03)	(161.650.732.953,01)	14,53
Jumlah		3.285.701.845.061,32	3.285.701.845.061,32	252.911.085.783,50	8,26

*Data yang digunakan bersumber dari hasil pengolahan tahun 2023.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dari hasil observasi yang telah ditentukan tentang pencatatan akuntansi aset tetap Pemerintah Kota Serang sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2010 (SAP) dan Peraturan Walikota Serang tentang Aset Tetap. Entitas (Organisasi) yang menggunakan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual, menandakan bahwa seluruh prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku serta ketentuan hukum yang berlaku. Secara spesifik, penanganan akuntansi pada aset tetap di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Serang, terutama mengenai pembagian aset tetap, pengakuan, penilaian, biaya setelah perolehan, dekomisioning dan penjualan, serta pengungkapan aset tetap, telah dilaporkan dengan sangat baik. BPKAD Kota Serang menerapkan metode penyusutan garis lurus sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Nomor 7 digunakan sebagai panduan dalam mengalkulasikan penyusutan aset tetap. Hal ini karena nilai aset tersebut sudah mencapai akhir masa pakainya dan tidak digunakan lagi setelah masa pakainya habis

DAFTAR PUSTAKA

- Amri, N. F., & Laming, R. F. (2020). Praktisi Akuntansi Di Kota Makassar: Pendapatan Driver Transportasi Berbasis Online. *Jurnal Mirai Management*, 5(2).
- Amri, N. F., Laming, R. F., & Thanwain, T. (2022). Sistem Pengendalian Intern (SPI) Menjadi Dalang Problematika Akuntansi. *SEIKO: Journal of Management & Business*, 5(1), 677-684.
- Ardana, I.C., & Lukman, H. (2016). *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Baso, R., Bintary, Selviani., & Sumarni. (2020). Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD). (online). Vol. 1. No. 1. <http://doi.org/10.37531/ecotal.v1i1.6>.
- Hasniati, H., Indriasari, D. P., & Sirajuddin, A. (2022). Marketing Mix Analysis on Increasing Sales Volume at Perumnas Branch I Tamalanrea in Makassar. *International Journal of Social Science Research and Review*, 5(7), 10-21. <https://doi.org/10.47814/ijssrr.v5i7.357>
- Herison, R., Sahabuddin, R., Azis, M., & Azis, F. (2022). The Effect of Working Capital Turnover, Accounts Receivable Turnover and Inventory Turnover on Profitability Levels on the Indonesia Stock Exchange 2015-2019. *Psychology And Education*, 59(1), 385-396.
- Idris, M. (2019). *Manajemen Keuangan*, Fakultas Ekonomi Bosowa Makassar, Indonesia.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. (2016). *Standar Akuntansi Keuangan Revisi 2016*. Salemba Empat. Jakarta. IAI.
- Ismail, M., Sahabuddin, R., Idrus, M. I., & Karim, A. (2022). Faktor Mempengaruhi Keputusan Pembelian pada Online Marketplace pada Mahasiswa Universitas Hasanuddin. *SEIKO: Journal of Management & Business*, 5(1), 49-59. <https://doi.org/10.37531/sejaman.v5i1.1831>
- Jumarding, A., Mane, A. A., & Karim, A. (2021). Desa wisata menunjang transformasi ekonomi nasional.
- Laming, R. F., & Amri, N. F. (2021). WHISTLEBLOWING PADA INDUSTRI PERBANKAN DI INDONESIA. *SIMAK*. 19(02). 328-338.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Jakarta, Indonesia.
- Raki, A. (2019). Analisis Penerapan Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Angkat Berdasarkan PSAP Nomor 07 Tahun 2010. Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
- Schroeder, Clark, Cathey. (2015). *TEORI AKUNTANSI KEUANGAN*. Salemba Empat. 241-253.
- Syamsuddin, I., Muhammad, P. N., & Karim, A. (2022). Analisis Kinerja Anggaran Belanja pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018- 2020. *YUME: Journal of Management*, 5(2), 170-177.
- Wisnantiasri, S. N. (2018). Pengaruh PSAK 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan terhadap Shareholder Value. *Widyakala: Journal of Pembangunan Jaya University*, 5(1), 60-65.

BIODATA PENULIS



Deny Aditya. Lahir di Bekasi pada tanggal 01 Desember 1996. Saat ini sedang menempuh Pendidikan Pascasarjana Magister Akuntansi di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Alamat di Jl. Raya Banten Km. 5 Kasemen Kota Serang, Provinsi Banten. Email : denyaditya0112@gmail.com



Dini Khoirunnisa. Lahir di Serang pada tanggal 10 Maret 1995. Saat ini sedang menempuh Pendidikan Pascasarjana Magister Akuntansi di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Alamat di Jl. Jend. A. Yani, Cipare, Kota Serang, Provinsi Banten. Email : dinnisa10@gmail.com



Dr. Lia Uzliawati, S.E., M.Si. Lahir di Serang 07 November 1976. Pangkat/Golongan IV b / Pembina Tk. I. Jabatan Fungsional Lektor Kepala Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Kepakaran mengenai Akuntansi Keuangan, *Corporate Governance*. Email : uzliawati@untirta.ac.id; uzliawati76@gmail.com